



**KOMPARASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml
dan No.87/Pid.Sus/2021/Pn.Sdk)**

MEMORANDUM HUKUM

GIFFARI HAYFA LABIBA

1810611268

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM

JUDUL :

**KOMPARASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPII DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml
dan No.87/Pid.Sus/2021/Pn.Sdk)**

GIFFARI HAYFA LABIBA

NIM 1810611268

Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

NIK. 486011310391



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Memorandum hukum diajukan oleh:

Nama : Giffari Hayfa Labiba

NIM : 1810611268

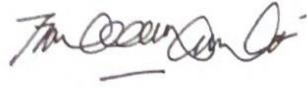
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Komparasi Pemberatan Pidana Terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

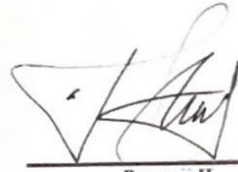
Ketua Penguji,

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.



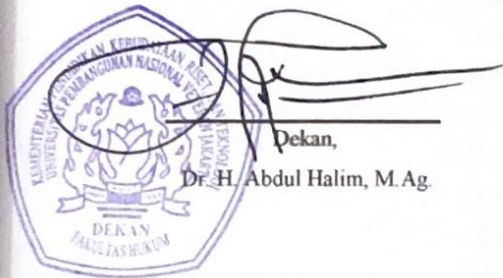
Penguji I,

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH



Penguji II,

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H



Dekan,

Dr. H. Abdul Halim, M. Ag.



Ketua Program Studi,

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Giffari Hayfa Labiba
Tempat / Tgl Lahir : Jakarta, 6 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pisangan Lama II No.17
No. Telpon : 081281409837
Email : giffarihayfa@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Eddy
b. Ibu : Yuni

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Labs School Kaizen (Lulus Tahun 2011)
2. SMP : SMP Diponegoro (Lulus Tahun 2014)
3. SMA : SMAN 36 Jakarta (Lulus Tahun 2017)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam memorandum hukum adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Giffari Hayfa Labiba

NIM : 1810611268

Tanggal : 13 Juni 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Giffari Hayfa Labiba

NIM/NPM : 1810611268

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Memorandum Hukum

Judul : Komparasi Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/Pn.Sdk)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah memorandum hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 13 Juni 2021

Yang menyatakan,



Giffari Hayfa Labiba

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum yang berjudul “Komparasi Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perbandingan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus.2021/PN.Sdk)”.

Selama penyusunan hingga selesainya memorandum hukum ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak, sulit kiranya menyelesaikan memorandum hukum ini disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Mami & Ayah tercinta.
2. Ibu Dr. Erna Hernawati, A.k., C.P.M.A., C.A. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Ibu Dr. Atiek Winanti, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
9. Bapak Surahmad, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

10. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Memorandum hukum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan maupun penyusunan memorandum hukum ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap memorandum hukum ini dapat menjadi bahan keilmuan bagi para pembaca, Penulis juga menerima masukan kritik dan saran yang membangun untuk memorandum hukum ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga memorandum hukum ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 13 Juni 2021



Giffari Hayfa Labiba

1810611268

RINGKASAN

**KOMPARASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PERBANDINGAN NO.122/PID.SUS/2020/PN.PML DAN
NO.87/PID.SUS/2021/PN.SDK)**

***COMPARISON OF CRIMINAL CHARGES AGAINST CIVIL SERVANTS IN
NARCOTICS CRIMES (CASE STUDY OF VERDICT NUMBER
122/PID.SUS/2020/PN.PML AND NUMBER 87/PID.SUS/2021/PN.SDK)***

Giffari Hayfa Labiba (1810611268)

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: giffarihayfa@gmail.com

Abstrak

Saat ini, tindak pidana narkotika sudah merambah berbagai penjuru daerah di Indonesia dan meluas di seluruh lapisan masyarakat termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana narkotika sangat bertentangan dengan program yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil selaku abdi negara, diangkat oleh negara dan diberikan upah dari keuangan negara, memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang yang bukan Pegawai Negeri. Perbedaannya terdapat pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, jika seorang Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka sudah sepatutnya sanksi pidana yang diberikan lebih berat dari orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Terkait aturan pemberatan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika belum diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dari permasalahan tersebut, penulis membuat penelitian mengenai komparasi pemberatan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pegawai Negeri Sipil, Pemberatan Pidana.

Abstract

Currently, narcotics crimes have penetrated various regions in Indonesia and are widespread in all levels of society including civil servants (PNS). The involvement of Civil Servants in narcotics crimes is very contrary to the program required by the government, namely the National Disciplinary Movement (GDN) in Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. Civil Servants as state servants, appointed by the state and given wages from state finances, have a different position from people who are not Civil Servants. The difference lies in the certain authority granted by the state to civil servants. Therefore, if a Civil Servant is involved in a narcotics crime, then it is appropriate that the criminal sanctions given are more severe than those who are not Civil Servants. Regarding the criminal enforcement rules against Civil Servants involved in narcotics crimes, it has not been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. So from this problem, the author made a study on the comparison of criminal charges against Civil Servants in Narcotics Crimes.

Keywords: *Narcotics Crimes, Civil Servant, Criminal Prosecution.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Kasus Posisi.....	1
I.1.A. Kronologi Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Pml.....	1
I.1.B. Kronologi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk.....	2
I.2 Isu Hukum.....	4
I.3 Permasalahan Hukum.....	5
BAB II IDENTIFIKASI FAKTA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	6
II.1 Identifikasi Fakta.....	6
II.1.A Identifikasi Fakta Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Pml.....	6
II.1.B Identifikasi Fakta Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk.....	10
II.2 Pemeriksaan Dokumen.....	26
BAB III ANALISIS HUKUM.....	28
III.1 Pengaturan Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	28
III.2 Komparasi Pemberatan Pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan No.122/Pid.Sus/2020/PN.Pml dan No.87/Pid.Sus/2021/PN.Sdk	33
BAB IV PENUTUP.....	49
IV.1 Kesimpulan.....	49
IV.2 Rekomendasi.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	55
Lampiran 1: Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir.....	55
Lampiran 2: Lembaran Turnitin.....	57